



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Pengaruh Dilema Aliansi Amerika Serikat dan Jepang
terhadap Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang

Skripsi

Oleh

Velicia Faustine Halim

2014330057

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Pengaruh Dilema Aliansi Amerika Serikat dan Jepang
terhadap Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang

Skripsi

Oleh

Velicia Faustine Halim

2014330057

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Velicia Faustine Halim
Nomor Pokok : 2014330057
Judul : Pengaruh Dilema Aliansi Amerika Serikat dan Jepang terhadap Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 5 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Albert Triwibowo, S.IP., M.A.

: 

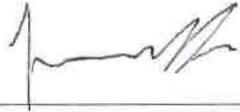
Sekretaris

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Velicia Faustine Halim
NPM : 2014330057
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pengaruh Dilema Aliansi Amerika Serikat dan
Jepang terhadap Rekonseptualisasi Pasifisme di
Jepang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Januari 2018



Velicia Faustine Halim

Abstrak

Nama : Velicia Faustine Halim
NPM : 2014330057
Judul : Pengaruh Dilema Aliansi Amerika Serikat dan Jepang terhadap
Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengaruh dilema aliansi Amerika Serikat dan Jepang terhadap rekonseptualisasi pasifisme di Jepang dengan menggunakan model longitudinal dan pendekatan naratif. Rekonseptualisasi pasifisme di Jepang mengimplikasikan semakin menurunnya intensitas *one-country pacifism* dan reinterpretasi Pasal Sembilan yang semakin fleksibel. Dalam penulisan kualitatif ini, didapatkan hasil penelitian bahwa risiko *entrapment* dan rendahnya kekuatan tawar Jepang dalam dilema aliansi AS-Jepang mempengaruhi rekonseptualisasi pasifisme di Jepang. Simpulan tersebut dapat diperoleh dengan memetakan permasalahan pada kerangka teoretis Glenn Snyder mengenai Dilema Aliansi. Konsep “dilema aliansi” merujuk pada dua opsi yang dapat dipilih oleh negara untuk menghindari risiko tertentu dalam aliansi, yakni: strategi “C” (bekerja sama) dan strategi “D” (membelot). Berdasarkan analisa, akan diketahui bahwa Jepang lebih condong memilih strategi “C” karena faktor ketergantungan yang tinggi pada AS. Akhirnya, posisi kekuatan tawar yang lebih rendah dari AS dan risiko *entrapment* sebagai prospektif buruk dalam strategi “C” akan menjadi penjelasan, dengan mengaitkannya pula pada Konsep James D. Morrow mengenai Otonomi dan Keamanan.

Kata kunci: Rekonseptualisasi, *One-Country Pacifism*, Doktrin Yoshida, Reinterpretasi Pasal Sembilan, Dilema Aliansi AS-Jepang

Abstract

Name : Velicia Faustine Halim
NPM : 2014330057
Title : The Impact of Alliance Dilemma between the United States
and Japan towards Reconceptualization of Pacifism in Japan

The purpose of this study is to elucidate the impact of alliance dilemma between the United States and Japan towards reconceptualization of pacifism in Japan through longitudinal model and narrative approach. Reconceptualization of pacifism in Japan implies a decline rate of one-country pacifism and increasingly flexible reinterpretation of Article 9. In this research, it turns out that Japan's lower position of bargaining leverage than U.S. and the risk of entrapment in alliance dilemma between U.S.-Japan affect the reconceptualization of pacifism in Japan. The conclusion draws on the findings through theoretical framework of Glenn Snyder's Alliance Dilemma. The term 'alliance dilemma' refers to two choices states may pick to avoid certain risks in the alliance: "C" strategy (to cooperate) or "D" strategy (to defect). It is eventually revealed in the analysis that Japan is more inclined to choose "C" strategy, since it is very dependent on U.S. As the bad prospective in "C" strategy eventually comes into effect, Japan's lower position of bargaining leverage than U.S. and the risk of entrapment it bears become a reason, through connecting them also with the Concepts of Autonomy and Security from James D. Morrow.

Key words: Reconceptualization, One-Country Pacifism, Yoshida Doctrine, Reinterpretation of Article 9, Alliance Dilemma between U.S.-Japan

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas selesainya penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dilema Aliansi Amerika Serikat dan Jepang terhadap Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang.”** Penulis mengajukan karya tulis ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana untuk Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

“Rekonseptualisasi” memang merupakan suatu konsep yang terasa asing untuk didengar. Istilah tersebut sebenarnya merujuk pada sebuah proses mengarahkan kembali penggunaan konsep ke bentuk yang lebih tepat dan produktif, tetapi tak jarang malah melemahkan nilai eksplanatif si konsep. Rekonseptualisasi untuk term “pasifisme” di Jepang, dengan efek samping melemahnya nilai eksplanatif karena reinterpretasi Pasal Sembilan, lah yang akan menjadi kasus penelitian skripsi ini. Untuk itu, penulis akan membawa pembaca dalam menjelajahi periodisasi proses reinterpretasi Konstitusi Pasifisme di Jepang yang tak jarang ditujukan guna menjustifikasikan kebijakan luar negerinya yang cukup kontroversial. Lantas, penulis pun juga sangat termotivasi untuk mendesain penelitian ini dengan mencari tahu bagaimanakah pengaruh dari dilema aliansi Amerika Serikat dan Jepang terhadap rekonseptualisasi pasifisme di Jepang tersebut. Hal ini dikarenakan dengan melihat data di tiap periodisasi waktu dalam skripsi ini, ditemukan pengaruh dan keterlibatan AS untuk proses pembuatan kebijakan Jepang.

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat senantiasa menjadi petunjuk yang bermanfaat, referensi, tambahan informasi, serta pengetahuan bagi para pembacanya dan kalangan akademis terkait. Tentunya selama menyusun hasil karya ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kelemahan dan kekurangannya tersendiri, baik secara teknis maupun dari segi substansi. Untuk itu, penulis secara terbuka bersedia menerima saran atau kritik yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan substansi skripsi ini.

Bandung, 15 Januari 2018

Velicia Faustine Halim

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menjalani masa studi di Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, hingga terselesaikannya penelitian skripsi ini. Secara khusus, penulis sampaikan rasa terima kasih yang terdalam kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, atas karunia dan berkat-Nya yang senantiasa menyertai dan memberkati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tua penulis, **Cendana Halim** dan **Nelly Lauren**, yang tiada hentinya memberikan dukungan, arahan, dan doa mereka pada penulis. Juga kepada **Ii Lani** yang selalu memberikan doanya dan dukungan untuk penulis.
3. **Idil Syawfi, S.IP., M.Si** atau **Mas Idil**. Terima kasih banyak yang terutama untuk waktu dan arahnya, dan juga atas wawasan yang memberikan titik terang ketika penulis memiliki banyak pertanyaan dan mengalami kesulitan selama bimbingan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dari penulis selama proses penyusunan skripsi, terutama terkait halaman bab data yang penulis sempat susun dengan sangat banyak dahulu. Serta kepada dewan penguji **Albert Triwibowo, S.IP., M.A. (Mas Abe)** dan **Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. (Mas Adri)** atas segala koreksi dan masukan yang luar biasa bagi karya penulis untuk ke depannya supaya menjadi lebih baik, dan juga atas dorongannya bersama Mas Idil agar penulis termotivasi untuk mengangkat skripsi ini ke dalam jurnal akademik.
4. **Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. **Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D.**, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
6. **Dr. Paulus Yohanes Nur Indro** atau yang lebih akrab dengan panggilan **Mas Nur**, dengan baik hati dan penuh wawasan menjawab semua pertanyaan penulis terkait konsep pasifisme, serta berdiskusi perihal Filsafat dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional dengan antusias bersama penulis.
7. Para personil Interpol. Pertama kepada **Sri Diana Kusumawati** atau lebih sering disapa dengan **Bu Diana**, atas kebaikannya yang sudah menerima penulis untuk magang di Divhubinter Polri dan membantu untuk menuliskan surat rekomendasi pencarian data ke Kedutaan Besar AS di Jakarta dan Kemenko Polhukam. Juga kepada **Albert B. M. Sihombing, S.IP., M.Si** (Sir Albert) yang sudah membantu penulis dalam pencarian data selama proses

penyusunan skripsi. Terakhir kepada **Mas Teddy**, yang telah memberikan saran dan *insight* untuk skripsi penulis.

8. **Dr. Pribadi Sutiono**, selaku Asisten Deputi untuk Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika Kemenko Polhukam, yang sudah memberikan waktunya untuk wawancara dan berdiskusi perihal topik seputar skripsi penulis.
9. *My besties*. Khususnya untuk teman baik penulis, **Mille Chan** yang sekarang berada di Taiwan, atas dukungan dan tawanya yang selalu menyemangatkan penulis, serta menjadi teman yang selalu dapat diajak *go crazy together*. 恭喜 你获得出色的考试成绩并祝未来一切顺利!
10. Pihak-pihak lainnya yang juga turut membantu dan tak sempat disebutkan dalam halaman ini.

Akhir kata, penulis selalu berharap kepada Tuhan agar berkenan membalas segala jasa dan kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu. Semoga penulisan untuk rancangan penelitian ini kelak bermanfaat demi perkembangan studi ilmu Hubungan Internasional.

Bandung, 15 Januari 2018

Velicia Faustine Halim

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Pembatasan Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	24
1.6.1 Metode Penelitian	24
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	27
1.7 Sistematika Penelitian	28
2. ONE-COUNTRY PACIFISM DAN REINTERPRETASI PASAL SEMILAN: DARI DOKTRIN YOSHIDA MENUJU NORMALISASI MILITER	30
2.1 Pasal Sembilan Konstitusi Jepang Pasca PD Ke-II	31
2.1.1 Formulasi Awal Pasal Sembilan	31
2.1.2 Amendemen Ashida	34
2.2 Signifikansi Pasal Sembilan terhadap Kebijakan Jepang Pasca Perang	36
2.2.1 Doktrin Yoshida: <i>Japan-U.S. Security Treaty</i> dan Pasal	

Sembilan	36
2.2.2 <i>One-Country Pacifism</i> : Pra dan Pasca Perang Teluk	39
2.3 Relasi antara Reinterpretasi Pasal Sembilan dengan Hubungan Aliansi AS dan Jepang	41
2.3.1 Kebijakan Pembentukan SDF dan Reinterpretasi Pasal Sembilan untuk Hak Pertahanan Diri	42
2.3.2 Partisipasi Jepang di Perang Teluk, Formulasi Hukum PKO untuk Misi PKO PBB, dan Reinterpretasi untuk Hak <i>Collective Security</i>	44
2.4 Jepang dalam Proses Normalisasi Militer Pasca 9/11	48
2.4.1 Keterlibatan SDF di Perang Afghanistan	48
2.4.2 Kontroversi Pengiriman SDF dalam Perang AS di Irak	51
2.4.3 Belanja Militer Jepang Pasca Perang	54
2.4.3 Kebijakan <i>Proactive Contribution to Peace</i> dan Reinterpretasi Pasal Sembilan Tahun 2015	60
3. ANALISA PENGARUH DILEMA ALIANSI AS-JEPANG TERHADAP REKONSEPTUALISASI PASIFISME DI JEPANG	68
3.1 Dilema Aliansi AS-Jepang dalam Kerangka Teori Dilema Aliansi	70
3.1.1 Perbandingan Kekuatan Militer Jepang dengan Lawan	71
3.1.2 Kekuatan AS sebagai Partner Aliansi	60
3.1.3 Tingkat Konflik di Kawasan Asia Timur	89
3.1.4 Pilihan Beraliansi Ulang	94
3.1.5 Kepentingan Strategis	97
3.2 Teori Dilema Aliansi untuk Menjawab Pengaruh Dilema Aliansi AS -Jepang terhadap Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang	100
3.3 Risiko <i>Entrapment</i> dan Rendahnya Kekuatan Tawar Jepang dalam Konsep Keamanan dan Otonomi oleh James D. Morrow	109
4. SIMPULAN	116
Daftar Pustaka	119

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Desain Skripsi perihal Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang (Tiga Periodisasi Waktu) dengan Model Longitudinal	25
Tabel 2.1	Anggaran Militer Jepang Tahun 2001-2016	56
Tabel 2.2	Perbandingan Belanja Militer Jepang dengan AS, Tiongkok, dan Korea Selatan Tahun 2001-2016	57
Tabel 2.3	Perbandingan Persentase Belanja Militer	58
Tabel 3.1	Lima Komando Teater PLA	73
Tabel 3.2	Perbandingan Kekuatan Militer Jepang, Korut, dan Tiongkok	77
Tabel 3.3	Komando UCP AS	83
Tabel 3.4	Perbandingan Kekuatan Militer Jepang dan AS	86
Tabel 3.5	Kebijakan Jepang atas Pengaruh AS sebagai Indikasi Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang	102

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Matriks Logika Berpikir Snyder Perihal Dilema Aliansi	17
Gambar 2.1	Ilustrasi Operasi OEF-MIO Jepang untuk Perang Afghanistan	51
Gambar 2.2	Ilustrasi Operasi Dukungan SDF di Perang Irak	54
Gambar 2.3	Grafik Belanja Militer Jepang Tahun 2001-2016	57
Gambar 2.4	Grafik Perbandingan Persentase Belanja Militer antara Jepang, AS, Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia Tahun 2001-2016	59
Gambar 2.5	Rangkuman Kebijakan Keamanan Nasional Jepang dalam NSS	63
Gambar 2.6	Rangkuman Permasalahan Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang	64
Gambar 3.1	Perbandingan Jangkauan Rudal Balistik Korut	72
Gambar 3.2	Ilustrasi Komando Teater PLA	74
Gambar 3.3	Jangkauan Rudal Balistik Tiongkok	76
Gambar 3.4	Ilustrasi UCP AS	85
Gambar 3.5	Aktivitas Tiongkok di Sekitar Wilayah Perairan Jepang	92
Gambar 3.6	Matriks Hubungan Dilema Aliansi AS-Jepang dan Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang	100

Daftar Singkatan

AD	Angkatan Darat
AL	Angkatan Laut
AS	Amerika Serikat
ASDF	<i>Air Self-Defense Force</i>
AU	Angkatan Udara
AWACS	<i>Airborne Warning and Control System</i>
BMD	<i>Ballistic Missile Defense</i>
CLB	<i>Cabinet Legislation Bureau</i>
DMZ	<i>Demilitarized Zone</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GSDF	<i>Ground Self-Defense Force</i>
HNS	<i>Host Nation Support</i>
Hukum Anti-Terrorisme	<i>Anti Terrorism Special Measures Law</i>
Hukum PKO	<i>Act on Cooperation for United Peace Keeping Operations and Other Operations</i>
ICBM	<i>Intercontinental ballistic missile</i>
ISR	<i>Intelligence, surveillance, and reconnaissance</i>
Korsel	Korea Selatan
Korut	Korea Utara
LDP	<i>Japan Liberal Democratic Party</i>
MARFORPAC	<i>U.S. Marine Forces Pacific</i>
MIO	<i>Maritime Interdiction Operation</i>
MOD	<i>Japan Ministry of Defense</i>
MRBM	<i>Medium-ranged ballistic missile</i>
MSDF	<i>Maritime Self-Defense Force</i>
NDPG	<i>National Defense Program Guidelines</i>
NDPO	<i>National Defense Program Outline</i>
NPR	<i>National Police Reserve</i>
NSC	<i>U.S. National Security Council</i>
NSS	<i>National Security Strategy</i>
Obs _n	Variabel data yang diobservasi dalam penelitian
OEF	<i>Operation Enduring Freedom</i>
PACAF	<i>U.S. Pacific Air Forces</i>
PACFLT	<i>U.S. Pacific Fleet</i>
PAP	<i>People's Armed Police Force</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PD	Perang Dunia
PKO	<i>Peacekeeping Operation</i>
PLA	<i>People's Liberation Army</i>
PM	Perdana Menteri
SCAP	<i>Supreme Commanders of Allied Powers</i>
SDF	<i>Self-Defense Forces</i>

<i>Situations Law</i>	<i>Law Concerning Peace and Security in Situations in Areas Surrounding Japan</i>
SLBM	<i>Submarine-launched ballistic missile</i>
SRBM	<i>Short-ranged ballistic missile</i>
Strategi “C”	Strategi aliansi untuk bekerja sama atau <i>cooperation</i>
Strategi “D”	Strategi aliansi untuk membelot atau <i>defect</i>
T _n	Waktu dari variabel data yang akan diteliti
UCP	<i>Unified Command Plan</i>
U.S.	<i>United States</i>
USAFRICOM	<i>United States Africa Command</i>
USARPAC	<i>U.S. Army Pacific</i>
USCENTCOM	<i>United States Central Command</i>
USD	<i>U.S. Dollar</i>
USEUCOM	<i>United States European Command</i>
USFJ	<i>U.S. Forces Japan</i>
USFK	<i>U.S. Forces Korea</i>
USNORTHCOM	<i>United States Northern Command</i>
USPACOM	<i>United States Pacific Command</i>
USSOCOM	<i>The United States Special Operations Command</i>
USSOUTHCOM	<i>United States Southern Command</i>
USSR	<i>Union of Soviet Socialist Republics</i>
USSTRATCOM	<i>The United States Strategic Command</i>
USTRANSCOM	<i>United States Transportation Command</i>
Σ	Total

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca Perang Dunia ke-II, *one-country pacifism* merupakan karakter Jepang di pasca perang yang selama beberapa tahun telah menjadi landasan pemikiran untuk semua isu pertahanan di Jepang.¹ Secara garis besar, *one-country pacifism* merupakan pemikiran Jepang yang melihat konflik di luar batas wilayahnya sebagai bukan bagian dari urusannya. Manifestasi tendensi ini adalah kecenderungan Jepang yang tak jarang mengambil peran internasional yang minimal, terutama di sektor keamanan. Tendensi ini sangat erat pula dengan ketentuan pasifisme dalam Pasal Sembilan dan Doktrin Yoshida.

Dalam pandangan populer, Jepang sangat identik dengan doktrin pasifisme, yang merujuk pada Pasal Sembilan dan tak jarang disebut sebagai “Konstitusi Pasifisme” atau “Konstitusi Damai.” Pasal Sembilan Konstitusi Jepang memuat klausul penolakan peperangan dan larangan memelihara kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa internasional.² Walaupun pandangan umum yang melihat bahwa pasifisme merupakan doktrin sepihak yang dipaksakan oleh AS, Pasal Sembilan merupakan hasil negosiasi perundingan antara pihak AS dan Jepang

¹ Sam Jameson, “One-nation pacifism: Japan's security problems and challenges to the US-Japan alliance,” *Asia-Pacific Review* 5, no. 3 (1998): 65.

² Lihat Kantei, *The Constitution of Japan*, 1946, Tokyo.

pasca kekalahannya di PD ke-II.³ Meskipun masih menjadi sedikit perdebatan, Konstitusi Jepang yang berlandaskan prinsip pasifisme sebenarnya berasal dari ide politikus Jepang sendiri, yakni PM Shidehara Kijūrō.⁴ Dalam perjalanannya, tafsiran perihal dua paragraf Pasal Sembilan akan menjadi sorotan, khususnya untuk klausul pertahanan diri yang di masa-masa awal dilarang penerapannya.

Sementara Doktrin Yoshida merupakan konstelasi pemikiran PM Yoshida Shigeru yang dipertimbangkan dari: (1) aliansi dengan AS, yang diejawantahkan dalam *Japan-U.S. Security Treaty 1951* dan (2) Pasal Sembilan, yang menjadi pedoman pokok kebijakan di Jepang. Kombinasi kedua faktor tersebut melahirkan Doktrin Yoshida yang meliputi tiga fondasi kebijakan utama, yaitu:

1. Rehabilitasi ekonomi Jepang harus menjadi tujuan nasional yang utama sehingga kerja sama politik dan ekonomi dengan AS sangat diperlukan untuk merealisasikan hal tersebut.
2. Jepang harus tetap memiliki kekuatan militer yang minimal saja dan menghindari peran internasional dalam isu politik-strategis.
3. Untuk mendapatkan jaminan keamanan jangka panjang, Jepang akan menyediakan pangkalan militer untuk angkatan darat, laut, dan udara AS.⁵

³ Robert A. Fisher, "The Erosion of Japanese Pacifism: The Constitutionality of the 1997 U.S.-Japan Defense Guidelines," *Cornell International Law Journal* 32, no. 2 (1999): 396.

⁴ James E. Auer, "Article Nine of Japan's Constitution: From Renunciation of Armed Force 'Forever' To The Third Largest Defense Budget In The World," *Law and Contemporary Problems* 53, no. 2 (1990): 173.

⁵ Bert Edström, *Japan's Foreign Policy in Transition: The Way Forward for Japan as an International Actor In a World in Flux* (Singapore: Institute for Security and Development Policy, 2011), 13.

Lewat transaksi *quid pro quo* dalam perjanjian aliansi bersama AS, Jepang dapat memfokuskan dirinya untuk membenahi sektor ekonomi yang hancur akibat perang, sekaligus menikmati payung keamanan AS. Pada akhirnya, Jepang berhasil mendapatkan posisi sebagai kekuatan ekonomi di dunia pada akhir tahun 1960-an. Di sisi lain, oleh karena Doktrin Yoshida yang mengatur agar Jepang mengambil peran yang minimal dalam sektor militer dan internasional, karakter *one-country pacifism* sebelum tahun 1990-an sangatlah kental dalam ranah perpolitikan Jepang.

1.2 Identifikasi Masalah

Memasuki tahun 1990-an, intensitas *one-country pacifism* semakin melemah di Jepang, lantaran kebijakan Jepang yang semakin berbalik orientasi dari Doktrin Yoshida menuju proses normalisasi militer. Adapun, Perang Teluk I mengajarkan Jepang untuk mengambil bagian sebagai anggota dari sistem percaturan politik dengan berkontribusi lebih nyata. Hal ini dilatarbelakangi oleh kritikan keras AS dan dunia internasional karena Jepang lebih banyak mengirimkan bantuan dana (atau *checkbook diplomacy*) kepada Kuwait.⁶ Akhirnya, Jepang mengirimkan enam kapal penyapu ranjau (*minesweepers*) di Teluk Persia, yang menjadi pengiriman *Self-Defense Forces* (SDF) pertama kali di luar wilayah Jepang sejak PD ke-II.⁷ Kemudian sejak itu, Jepang juga memberlakukan perizinan bentuk *collective*

⁶ Michael K. Connors, Rémy Davison, dan Jörn Dosch, *The New Global Politics of The Asia Pacific* (New York: Routledge, 2012), 70.

⁷ Andrew L. Oros, *Normalizing Japan: Politics, Identity and the Evolution of Security Practice* (Stanford: Stanford University Press, 2008), 83.

security dan memformulasikan Hukum PKO agar dapat ikut serta dalam misi *UN peacekeeping operation* (PKO PBB).⁸

Tingkat *one-country pacifism* semakin melemah di Jepang setelah kejadian 9/11. Jepang yang tadinya sangat enggan untuk masuk ke dalam peran keamanan internasional, kini memilih untuk menjadi bagian dalam strategi keamanan global AS (sebagai bagian dari kampanye militer AS di Perang Afghanistan dan Irak). Untuk Perang Afghanistan, pasukan SDF diizinkan untuk menggunakan *use of force* dalam membela diri dan pihak yang berada di bawah perlindungannya untuk misi *Operation Enduring Freedom—Maritime Interdiction Operation* (OEF-MIO).⁹ Sementara di Perang Irak, pengiriman SDF didasari oleh *Law concerning the Special Measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq* (Hukum Irak), yang mengizinkan pengiriman SDF tanpa mandat PBB terlebih dahulu.¹⁰ Sementara itu memasuki era Kabinet Abe (tahun 2012), kebijakan PM Abe Shinzo perihal *Proactive Contribution to Peace* mendorong kebijakan reinterpretasi Pasal Sembilan agar memperbolehkan bentuk *collective self-defense* dan perizinan penggunaan *use of force* secara terbatas. Secara umum, kebijakan *Proactive Contribution to Peace* dimaksudkan agar Jepang dapat lebih tanggap dengan situasi internasional, seperti mengambil peran yang lebih luas dalam misi PKO PBB selain logistik. Di sisi lain, belanja militer Jepang mulai

⁸ Robert B. Funk, "Japan's Constitution and U.N. Obligations in the Persian Gulf War: A Case for Non-Military Participation in U.N. Enforcement Actions," *Cornell International Law Journal* 25, no. 2 (1992): 366.

⁹ Katsumi Ishizuka, "Japan's policy towards UN peacekeeping operations," *International Peacekeeping* 12, no. 1 (2005): 73.

¹⁰ Jonathan Watts, "End of an era as Japan enters Iraq," *The Guardian*, 26 Juli 2003, diakses pada 10 November 2017, <https://www.theguardian.com/world/2003/jul/26/iraq.japan>.

menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2012 dengan angka 4,65 menuju 4,86 triliun yen di tahun 2016.¹¹

Bandingkan segala kebijakan di atas dengan era sebelum tahun 1990-an, dengan tingkat *one-country pacifism* yang masih sangat kental. Hal ini dikarenakan Jepang masih sangat mengamini Doktrin Yoshida, yang menolak peran internasional dan tak diinginkannya dengan alasan tafsiran klausul tertentu yang dilarang dalam Pasal Sembilan.¹² Di sisi lain dalam era ini, ketika Perang Korea terjadi, AS meminta Jepang untuk mengangkat persenjataannya kembali dan membuat Jepang mengizinkan penerapan hak pertahanan diri. Klausul aplikasi hak pertahanan diri pada awalnya sempat dilarang dalam tafsiran resmi Pasal Sembilan, tetapi larangan tersebut dicabut untuk mendirikan pasukan SDF di tahun 1954.¹³

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa yang tadinya dilarang dalam Konstitusi, reinterpretasi Pasal Sembilan pun secara bertahap membuahkan perizinan untuk hak pertahanan diri, *collective security*, *collective self-defense*, dan *use of force* secara terbatas. Adapun, tingkat *one-country pacifism* semakin melemah dari semenjak pasca PD ke-II hingga setelah kejadian 9/11. Tingkat *one-country pacifism* yang semakin melemah dan segala tafsiran Konstitusi Pasifisme di atas yang dilakukan berulang-ulang, mencerminkan proses “rekonseptualisasi,” yakni suatu cara untuk mengarahkan kembali penggunaan konsep ke bentuk yang lebih tepat dan produktif.¹⁴ Efek samping melemahnya nilai eksplanatif untuk

¹¹ Lihat Japan Ministry of Defense, *Defense of Japan*, 2016, Tokyo.

¹² Jameson, “One-nation pacifism,” 67.

¹³ Lihat David Arase, “Japan, the Active State?: Security Policy after 9/11,” *Asian Survey* 47, no. 4 (2007): 563.

¹⁴ J. Douglas Orton dan Karl E. Weick, “Loosely Coupled Systems: A Reconceptualization,” *The Academy of Management Review* 15, no. 2 (1990): 203-223.

konsep “pasifisme” dalam rekonseptualisasi inilah yang kini terjadi di Jepang. Dengan terus dilakukannya kebijakan reinterpretasi Pasal Sembilan, “pasifisme” di Jepang dengan gampangya terus ditafsir ulang untuk menjustifikasi kebijakan tertentu (contoh: dari yang tadinya tidak memperbolehkan hingga kini diizinkan bentuk *use of force*).

Lantas, rekonseptualisasi pasifisme di Jepang mengimplikasikan semakin menurunnya intensitas *one-country pacifism* dan reinterpretasi Pasal Sembilan yang semakin fleksibel. Wujud rekonseptualisasi pasifisme di Jepang ditandai dengan kebijakan Jepang yang berbalik orientasi dari Doktrin Yoshida menuju proses normalisasi militer, dan dapat diklasifikasikan melalui tiga periodisasi waktu, yaitu: (1) pendirian *Self-Defense Forces* (SDF); (2) pengiriman SDF ke Perang Teluk I dan formulasi Hukum PKO untuk misi PKO PBB; serta (3) pengiriman SDF ke Perang Afghanistan dan Irak, dan Kebijakan Abe perihal *Proactive Contribution to Peace*.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dari penjabaran bagian sebelumnya, setidaknya penelitian ini akan mengeksplorasi permasalahan terkait rekonseptualisasi pasifisme di Jepang, sejak dibuatnya kebijakan Jepang untuk membentuk pasukan SDF hingga pengeluaran kebijakan dari PM Abe perihal *Proactive Contribution to Peace* untuk mereinterpretasi Pasal Sembilan. Pembatasan konstelasi permasalahan dalam karya tulis ini dapat dilihat melalui klasifikasi kebijakan dengan *tiga periodisasi waktu* berikut.

- 1) **Pasca PD ke-II (Tahun 1954):** Pendirian *Self-Defense Forces* (SDF),
- 2) **Tahun 1991:** Pengiriman SDF saat Perang Teluk I dan formulasi Hukum PKO untuk misi PKO PBB, serta
- 3) **Pasca 9/11 (Tahun 2001-2016):** Pengiriman SDF ke Perang Afghanistan dan Irak, serta Kebijakan Abe (tahun 2012-16) perihal *Proactive Contribution to Peace*.

Ketiga periodisasi waktu tersebut dipilih karena signifikansinya dengan fenomena rekonseptualisasi pasifisme di Jepang, yang mengukur tingkat *one-country pacifism* dan menyinggung klausul-klausul dalam Pasal Sembilan yang direinterpretasi secara bertahap. Periode pendirian SDF diperlukan untuk memperlihatkan tingkat *one-country pacifism* yang semakin kental dan reinterpretasi untuk perizinan hak pertahanan diri. Sementara periode Perang Teluk I dan perizinan untuk mengikuti misi PKO mengindikasikan titik balik tingkat *one-country pacifism* yang mulai menurun dan perizinan bentuk *collective security*. Terakhir, kebijakan Jepang di pasca 9/11 mengindikasikan tingkat *one-country pacifism* yang menurun, dan perizinan bentuk *collective self-defense* dan *use of force*. Dinamika tiga periodisasi waktu ini diperlukan untuk menelaah kasus yang disebut oleh penulis sebagai rekonseptualisasi pasifisme di Jepang.

1.2.2 Rumusan Masalah

Pada pembahasannya, tulisan ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan:

Bagaimanakah pengaruh dilema aliansi Amerika Serikat dan Jepang terhadap rekonseptualisasi pasifisme di Jepang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk dapat mencapai kedua hal berikut, yakni:

- 1) Menjelaskan pengaruh dilema aliansi Amerika Serikat dan Jepang terhadap rekonseptualisasi pasifisme di Jepang.
- 2) Memetakan permasalahan rekonseptualisasi pasifisme di Jepang secara terstruktur pada kerangka teoretis Glenn Snyder mengenai Dilema Aliansi, sebagai turunan teori dari paradigma Neorealisme, dan mengaitkannya dengan Konsep Otonomi dan Keamanan dari James D. Morrow.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Tentunya penelitian ini diharapkan oleh penulis untuk:

- 1) Menyajikan dan menambah wawasan yang bermanfaat bagi para akademisi, terutama yang bergelut dalam studi kajian strategis, politik internasional, dan kebijakan luar negeri.

- 2) Memberikan gambaran terkini terkait masalah yang tengah dihadapi oleh Jepang dengan mengeksplorasi kasus rekonseptualisasi pasifisme di Jepang.
- 3) Menjadi referensi atau acuan untuk mengembangkan penelitian di masa mendatang yang berkaitan dengan topik penulisan ini.

1.4 Kajian Literatur

Tinjauan literatur pada bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sumber-sumber yang ada membahas topik penelitian yang berkaitan dengan milik penulis dari persepsi tertentu. Adapun proses rekonseptualisasi pasifisme di Jepang dalam publikasi lain, sering kali diindikasikan sebagai proses Jepang yang semakin berubah menjadi “negara normal” ataupun formulasi kebijakan Jepang yang semakin terasa realis. Penulis akan memasukkan enam literatur, dengan mendikotomikan pandangan dalam keseluruhan karya tulis tersebut menjadi dua kubu. Kubu pertama diwakili oleh publikasi milik Jameson, Panton, dan Dupont yang menganggap bahwa *interplay* pengaruh AS dan instabilitas di kawasan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi rekonseptualisasi pasifisme di Jepang. Sementara kubu kedua, Samuels, Hughes, dan Arase, lebih menekankan pada pribadi AS sebagai faktor yang paling berpengaruh. Berikut adalah ulasan ringkas terkait perdebatan antara dua kubu di atas.

Dari kubu pertama, artikel Jameson merincikan proses normalisasi kebijakan luar negeri Jepang dengan melihat dinamika perkembangan karakter *one-nation pacifism* di Jepang dari pasca PD ke-II hingga tahun 1990-an. Secara garis

besar, *one-nation pacifism* dalam konteks pembahasan Jameson diilustrasikan dengan Jepang yang melihat konflik di luar wilayahnya sebagai “api di sisi seberang sungai” yang tak memiliki relevansi dengan dirinya.¹⁵ Beliau menilai bahwa karakter *one-country pacifism* sangat tampak selama pasca PD ke-II. Meskipun begitu, kecenderungan tersebut tampak mulai memudar saat Perang Teluk I, oleh kebijakan *checkbook diplomacy* Jepang (mengirimkan dana saja dan bukan bantuan pasukan) yang menuai kritik AS dan dunia internasional. Oleh karena rasa malu, Jepang kala itu mengeluarkan Hukum PKO dan mulai mengambil sebagian kecil dari peranan internasional untuk menjaga dunia melalui misi PKO pertamanya di Kamboja. Jameson pun mengambil simpulan bahwa perubahan dalam kebijakan Jepang didasari karena: (1) ancaman Tiongkok; (2) nuklir Korea Utara; serta (3) permasalahan pasukan AS di Pulau Okinawa. Menghadapi ketiga tantangan tersebut, Jameson meyakini bahwa Jepang harus melanjutkan kebijakannya yang berfokus di sektor keamanan, yakni:

- 1) Pertama, melanjutkan aliansi dengan AS dan memelihara pangkalan AS di Jepang untuk menjaga komitmen AS dalam aliansi;
- 2) Kedua, melakukan dialog aktif di kancah regional untuk meyakinkan negara-negara Asia bahwa Jepang tidak memiliki maksud untuk menjadi negara militer seperti di PD ke-II; serta
- 3) Ketiga, mencanangkan kebijakan bantuan dan integrasi ekonomi dengan negara-negara di Asia, agar negara Asia lainnya yang belum

¹⁵ Jameson, “One-nation pacifism,” 65.

terikat melihat Jepang sebagai negara yang harus dilibatkan dalam kebijakan mereka.¹⁶

Jameson memercayai bahwa yang paling penting di antara ketiga kebijakan tersebut adalah hal yang terakhir karena berkaitan dengan Tiongkok. Bilamana Tiongkok dapat menjadi negara *superpower* di masa depan lalu hubungan antara Jepang dan Tiongkok dapat menjadi akur, maka diyakini oleh Beliau bahwa stabilitas kawasan Asia dapat terjaga dan AS dapat mengambil bagian dari kesejahteraan yang diciptakan oleh Jepang dan Tiongkok.

Di kubu yang sama dengan Jameson, Panton mengemukakan faktor-faktor terpenting yang mendorong reformasi kebijakan pertahanan Jepang, yakni: (1) kekuatan AS yang melemah dan pertanyaan terkait komitmen AS untuk Jepang dan kawasan Asia Timur; (2) aliansi keamanan dengan AS; dan (3) instabilitas regional di Asia Timur (Korut dan Tiongkok). Pembahasan perihal ketiga faktor eksternal di atas dapat diringkas sebagai berikut: Jepang menaruh pandangan bahwa terdapat ancaman dari ketidakmampuan AS untuk mempertahankan hegemoninya sebagai penyeimbang di kawasan Asia Timur karena faktor penurunan ekonomi AS.¹⁷ Hal ini pun menimbulkan pertanyaan: dengan kapasitas ekonomi yang menurun, bisakah AS tetap menjaga komitmennya untuk Jepang dan Asia Timur? Jepang pun semakin gelisah pada pasca Perang Dingin lantaran AS yang mengurangi jumlah pasukannya di Jepang, sementara Tiongkok dan Korut semakin gencar membangun kapabilitas militer masing-masing. Kemudian, AS tak jarang

¹⁶ *Ibid.*, 83.

¹⁷ Michael A. Panton, "Politics, Practice and Pacifism: Revising Article 9 of the Japanese Constitution," *Asian-Pacific Law & Policy Journal* 11, no. 2 (2010): 192.

menekan Jepang untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam keamanan regional, sebagaimana yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian aliansi mereka. Untuk memenuhi standar permintaan AS, tak jarang Jepang pun terus menerus mereinterpretasi Pasal Sembilan untuk berkontribusi sesuai kewajibannya sekaligus menjaga jaminan perlindungan AS.¹⁸ Jadi, oleh karena *interplay* ketiga faktor tersebut, Jepang secara bertahap melakukan ekspansi militer dengan mengurangi ketentuan yang dilarang dalam Pasal Sembilan.

Masih di kubu yang sama, pembahasan utama *Unsheathing the Samurai Sword: Japan's Changing Security Policy* oleh Dupont sebenarnya tak jauh berbeda dengan milik Jameson dan Panton, bahwa perubahan kebijakan keamanan Jepang didasari oleh faktor pengaruh AS dan instabilitas di kawasan.¹⁹ Yang perlu disoroti adalah persepsi unik Dupont yang melihat proses rekonseptualisasi pasifisme sebagai proses evolusi, yakni pergeseran konsensus pasifisme menuju realisme pragmatis.²⁰ Transisi ini dicirikan dengan adanya kebutuhan bagi Jepang untuk memodernisasi pasukan pertahanannya dan keterlibatan SDF yang semakin tinggi dalam peran PKO PBB. Kemudian dewasa ini, pelarangan perizinan di lapangan untuk penggunaan kekuatan bersenjata dan aplikasi hak *collective self-defense* kian melarut.

Antitesis dengan kubu pertama terjadi, manakala kubu kedua (Samuels, Hughes, dan Arase) mengemukakan faktor AS yang lebih berpengaruh untuk proses normalisasi Jepang dewasa ini. Samuels menyorot perubahan *grand strategy*

¹⁸ *Ibid.*, 194.

¹⁹ Alan Dupont, *Unsheathing the Samurai Sword: Japan's Changing Security Policy* (Sydney: Lowy Institute for International Policy Paper, 2004), 55.

²⁰ *Ibid.*, 54.

Jepang yang dipengaruhi oleh situasi domestik perpolitikan Jepang dan juga pergeseran perimbangan kekuatan di kancah regional dan internasional. Dikatakan bahwa *grand strategy* Jepang mulai berbalik orientasi dari Doktrin Yoshida sejak pasca Perang Dingin, tepatnya saat Perang Teluk tahun 1991.²¹ Hampir sama dengan Jameson, Beliau menuliskan bahwa perubahan ini dilatarbelakangi oleh rasa malu akibat kritik AS dan dunia internasional karena Jepang tidak dapat mengirimkan pasukan. Selain kritik eksternal, faktor ancaman juga digunakan sebagai alasan untuk menjustifikasikan perubahan kebijakan Jepang, khususnya yang ditujukan untuk memodernisasi militernya. Terdapat empat ancaman yang dihadapi oleh Jepang, yakni: (1) peningkatan kekuatan Tiongkok; (2) ancaman Korea Utara; (3) kemungkinan ditinggalkan oleh AS dalam aliansi; serta (4) penurunan ekonomi Jepang.²²

Akan tetapi menurut Samuels, faktor utama yang mempengaruhi konteks strategis Jepang dan yang menjadi ancaman terbesar di antara segalanya adalah permasalahan aliansi dengan AS.²³ Ketika dihadapkan pada pilihan antara memeluk risiko terjatuh dalam aliansi bersama AS ataukah risiko ditinggalkan, Jepang selalu pertama kali memilih untuk merespons risiko ditinggalkan. Sebagai contoh, respon langsung Jepang untuk risiko ditinggalkan oleh AS adalah pengiriman pasukan di Irak oleh PM Koizumi dengan latar belakang bahwa Jepang hanya memiliki satu-satunya aliansi, yaitu AS. Hubungan aliansi dengan AS dianggap sebagai hal yang

²¹ Richard J. Samuels, *Securing Japan: Tokyo's Grand Strategy and The Future of East Asia* (New York: Cornell University Press, 2007), 91.

²² *Ibid.*, 4.

²³ *Ibid.*, 190.

paling mendasar dalam konteks besar geo-strategis bilamana Jepang ingin menjadi negara yang lebih normal.

Sementara itu, artikel Hughes juga membahas mengenai perubahan pola kebijakan di Jepang pasca tahun 1990-an, tetapi dengan menyisiri kebijakan penafsiran ulang Konstitusi Pasifisme.²⁴ Adapun sama halnya dengan Samuels, Hughes lebih berfokus pada pengaruh AS untuk formulasi kebijakan reinterpretasi Pasal Sembilan. Beliau mendasari argumennya dengan merujuk pada dua hal, yakni dengan pertama-tama melihat pengiriman SDF sebagai “kontribusi pasukan pertama Jepang” dan menjadi bagian dari koalisi multinasional untuk mendukung AS di Perang Teluk. Kedua adalah sejak 9/11, Jepang sekali lagi berada di bawah tekanan untuk mengirimkan pasukan dalam kampanye militer dan kebijakan *war on terror* AS.²⁵

Sama halnya dengan Samuels dan Hughes, Arase dalam artikel jurnalnya *Japan, the Active State?* menjabarkan perubahan orientasi kebijakan Jepang yang dipengaruhi oleh faktor aliansi bersama AS. Hanya saja, Arase lebih berfokus pada perubahan kebijakan Jepang yang sangat nyata pasca kejadian 9/11 secara struktur, institusional, dan normatif. AS terus menerus mendorong proses re-militerisasi untuk Jepang; dan di saat yang bersamaan, pengaruh tersebut membuat identitas Jepang sebagai aktor strategis menjadi lebih efektif dan responsif terhadap tekanan AS.²⁶ Ditambah dengan kompleksitas situasi di kawasan Asia Timur dan fluiditas

²⁴ Christopher W. Hughes, “Why Japan could revise its constitution and what it would mean for Japanese security policy,” *Orbis (Kidlington)* 50, no. 4 (2006): 728-729.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Arase, “Japan, the Active State?,” 583.

Jepang yang berhati-hati merespons instabilitas tersebut, Jepang semakin berkembang untuk meraih peranan keamanan yang baru di kancah internasional.

Perdebatan antara dua kubu mengenai faktor yang menyebabkan rekonseptualisasi pasifisme di Jepang tersebut, didasari oleh argumen yang jelas dengan masing-masing persepsi penulisnya. Adapun yang pertama adalah kubu Samuels, Panton, dan Dupont, yang memercayai bahwa *interplay* faktor AS dan instabilitas regional Asia Timur adalah faktor utama perubahan kebijakan keamanan Jepang ke arah yang lebih realistis. Sementara di sisi lain, blok kedua yang mencakup Samuels, Hughes, dan Arase, lebih memercayai faktor pengaruh AS. Penulis sendiri lebih meyakini pemikiran kubu kedua, dengan mengembangkan faktor pengaruh AS ini nantinya ke dalam konteks dilema aliansi di bagian analisa.

Di sisi lain, bilamana keenam sumber pustaka tersebut digabungkan, kita dapat menarik simpulan secara garis besarnya bahwa: (1) terdapat pergeseran kebijakan keamanan Jepang untuk menjadi lebih “normal” atau realistis; (2) kedinamikaan pergeseran kebijakan tersebut di Jepang; (3) faktor yang mendorong perubahan tersebut; dan (4) kebijakan reinterpretasi Pasal Sembilan yang mengiringi perubahan tersebut. Keseluruhan poin tersebut mungkin hanya dibahas beberapa secara terpisah dan terbatas dalam tiap literatur di atas. Misalnya, di bagian literatur Samuels, Beliau hanya membahas terkait poin (1), (2) dan (3), tetapi tidak mencakup poin keempat. Karya tulis Samuels pun juga serupa, bukunya yang berjudul *Securing Japan* lebih memuat pembahasan poin (1) sampai (3). Akan tetapi, permasalahan yang diusahakan untuk diangkat oleh penulis (rekonseptualisasi pasifisme di Jepang) adalah mencoba untuk mengangkat

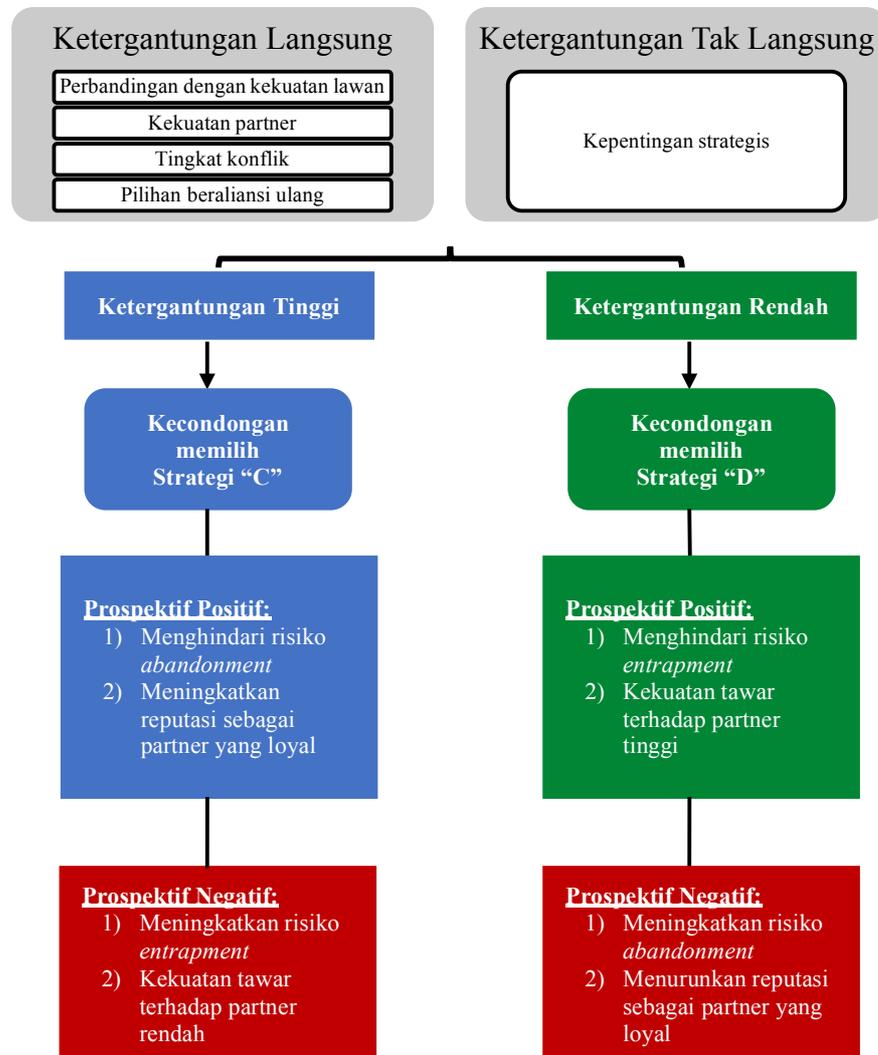
keseluruhan permasalahan yang dimuat secara ringkas, dan dibagi menjadi tiga periodisasi waktu untuk kemudahan penelitian yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Lantas, eksplorasi terkait rekonseptualisasi pasifisme di Jepang ini sangat penting untuk diteliti guna meluruskan faktor yang mempengaruhi normalisasi kebijakan Jepang dan hubungannya terhadap konstelasi permasalahan keempat poin yang telah disinggung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelaahan mengenai rekonseptualisasi pasifisme di Jepang akan menggunakan Teori Dilema Aliansi oleh Glenn Snyder, yang merupakan turunan pandangan dari Paradigma Neorealisme. Teori Dilema Aliansi Snyder bertumpu pada *game theory* dan konsep dilema keamanan.²⁷ Secara garis besarnya, dilema keamanan menurut Snyder merupakan *trade-off* antara dua pilihan berisiko yang dihadapkan kepada negara dalam aliansi ketika mereka memilih strategi atau komitmen tertentu, yakni: (1) *strategi "C"* (bekerja sama atau *cooperation*) yang dapat menghindari risiko *abandonment*, dengan komitmen yang kuat kepada partner; atau (2) *strategi "D"* yang menghindari risiko *entrapment*, dengan komitmen lemah untuk partner aliansi. Penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut akan dijabarkan selanjutnya, dan berikut adalah matriks ringkasan keseluruhan logika berpikir Snyder yang tersajikan dalam Gambar 1.1.

²⁷ Erich Reiter dan Heinz Gärtner, eds., *Small States and Alliances* (New York: Physica-Verlag Heidelberg, 2001), 89.

Gambar 1.1 Matriks Logika Berpikir Snyder Perihal Dilema Aliansi



Sumber: *The Security Dilemma in Alliance Politics*

Snyder mengemukakan bahwa setidaknya terdapat dua fase dalam dilema aliansi.²⁸ Fase pertama terjadi dalam proses pembentukan aliansi dan fase lainnya adalah setelah aliansi usai dibentuk. Untuk pembahasan ini, kita akan lebih berfokus pada fase kedua, yakni setelah aliansi terbentuk yang akan memuat

²⁸ Glenn H. Snyder, "The Security Dilemma in Alliance Politics," *World Politics* 36, no. 4 (1984): 462.

pilihan-pilihan yang harus diambil oleh negara perihal komitmen dan dukungan pada partnernya saat menghadapi lawan partner. Untuk itu dalam fase ini, terdapat dua pilihan yang dapat diambil, yakni: *strategi "C"* (bekerja sama atau *cooperation*) atau *strategi "D"* (membelot atau *defect*).²⁹ Strategi "C" berarti memberikan komitmen yang kuat dan dukungan penuh untuk partner bilamana terlibat dalam konflik dengan lawan. Sementara itu, strategi "D" berarti berkomitmen lemah dalam aliansi dan sedikit dukungan terhadap partner dalam konflik.

Dilema merupakan situasi sulit yang mengharuskan pemilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tak menyenangkan. Dalam dilema aliansi, akibat dari prospektif yang tak menyenangkan itu adalah ditinggalkan oleh partner aliansi (*abandonment*) dan berada dalam kondisi terjat (entrapment).³⁰ Dalam sistem yang multipolar, memang ikatan dalam aliansi tidak akan begitu kuat (betapapun persetujuan tertulis yang telah dibuat) sehingga risiko ditinggalkan oleh partner aliansi akan selalu ada. Risiko *abandonment* pada dasarnya adalah pembelotan negara yang memiliki beberapa bentuk, misalnya: negara membuat aliansi lagi dan bergabung dengan lawan partner; negara mundur dari aliansi dengan membatalkan kontrak; negara tidak memberikan komitmen yang cukup; ataupun gagal memberikan dukungan yang diharapkan oleh partner.³¹ Sementara risiko *entrapment* adalah bilamana negara terjat dalam konflik partner aliansi saat

²⁹ *Ibid.*, 467.

³⁰ Glenn H. Snyder, "Alliance Theory: A Neorealist First Cut," *Journal of International Affairs* 44, no. 1 (1990): 113.

³¹ Snyder, "The Security Dilemma in Alliance Politics," 466.

memperjuangkan kepentingan si partner (yang padahal tidak sama dengannya atau hanya setengah kepentingan saja yang serupa).

Hubungan antara risiko *abandonment* dan *entrapment* bersifat inversif, dengan *trade-off* di antara keduanya menghasilkan “biaya” tertentu yang harus ditanggung. Biaya atau risiko yang ditanggung ini akan tergantung pada opsi yang diambil negara, yaitu antara *strategi “C”* atukah *strategi “D”* yang telah disinggung sebelumnya. Strategi “C” menggambarkan komitmen yang kuat terhadap partner yang mengurangi risiko *abandonment*, karena rasa ketakutan akan risiko tersebut diganti dengan kepercayaan diri pada dukungan yang akan diberikan oleh partner. Negara tidak akan membelot, tetapi hal ini meningkatkan risiko *entrapment* untuk partner karena besarnya kemungkinan negara bertindak agresif dalam sengketa dengan lawannya. Dalam kondisi tingginya *entrapment* ini pula, kekuatan tawar (*bargaining leverage*) negara sangat lemah karena negara mengetahui bahwa dengan bergantung pada partnernya, pengaruh yang dimilikinya sangatlah rendah. Sementara negara dengan kekuatan tawar yang lebih besar dapat mengancam untuk meninggalkan aliansi, tak mendukung partner, atau mempersuasi negara untuk mengikuti kesepakatan tertentu dalam krisis dengan lebih mudah.³²

Sebaliknya dalam strategi “D”, bilamana komitmen lemah, risiko *abandonment* semakin tinggi karena kecurigaan terhadap loyalitas partner. Akan tetapi, negara memiliki kekuatan tawar yang besar karena ia bisa mengancam bila tidak mendapatkan dukungan dari partnernya. Selain itu, dikarenakan adanya

³² Glenn H. Snyder, *Alliance Politics* (New York: Cornell University Press, 1997), 168.

komitmen yang samar, opsi untuk beraliansi dengan negara lain tetap terbuka bilamana partner tidak memuaskan. Negara juga dapat memaksimalkan kekuatan tawar yang dimilikinya terhadap partner dengan menunjukkan bahwa dirinya memiliki alternatif lain untuk beraliansi ulang.

Snyder pun menambahkan bahwa terdapat faktor penentu yang sangat penting dalam aliansi yang dibayang-bayangi oleh risiko *abandonment* atau *entrapment*, yaitu ketergantungan yang bersifat relatif.³³ Ketergantungan dalam konteks dilema aliansi Snyder berarti seberapa besar negara membutuhkan bantuan yang diberikan oleh partnernya dan persepsi masing-masing negara mengenai tingkat ketergantungan mereka.³⁴ Selanjutnya, Snyder mengategorikan dua jenis ketergantungan dalam aliansi, yakni: (1) ketergantungan langsung dan (2) ketergantungan tidak langsung. Ketergantungan langsung memiliki empat faktor, yakni sebagai berikut.

- 1) **Perbandingan dengan kekuatan lawan.** Kebutuhan negara untuk meminta bantuan dalam perang, bilamana kapabilitas militer negara jauh berada di bawah kapabilitas militer lawan. Semakin besar jarak kekuatan antara negara dan lawan, maka semakin besar pula ketergantungan negara terhadap partner aliansinya.

³³ Snyder, "The Security Dilemma in Alliance Politics," 472.

³⁴ Sebenarnya selain melihat tingkat ketergantungannya, terdapat tiga faktor penentu lainnya untuk menilai risiko yang lebih ditakuti oleh negara dalam aliansi (antara *abandonment* dan *entrapment*), yakni melalui: (1) seberapa jelas isi persetujuan aliansi yang dibuat; (2) kepentingan yang sama dari negara-negara yang terlibat dalam aliansi dan terancam karena adanya konflik dengan lawan; serta (3) sejarah tingkah laku negara partner di masa lampau. Akan tetapi untuk kemudahan dan efisiensi analisa, penulis memutuskan untuk memakai faktor ketergantungan saja yang sudah memiliki determinan-determinan spesifik untuk menjelaskan permasalahan rekonseptualisasi pasifisme di Jepang.

- 2) **Kekuatan partner** dalam memberikan dukungan. Semakin besar kekuatan partner, maka semakin besar pula ketergantungan yang ada.
- 3) **Tingkat konflik** yang timbul antara negara dengan lawannya. Semakin besar intensitas konflik itu, maka semakin tinggi pula ketergantungan yang tercipta.
- 4) **Pilihan untuk beraliansi ulang**. Semakin banyak pilihan yang negara punya untuk beraliansi, maka ketergantungan dalam aliansi akan semakin kecil.³⁵

Sementara ketergantungan tak langsung meliputi *kepentingan strategis*, yakni kepentingan sebuah negara untuk menjaga agar sumber daya partner tidak jatuh ke tangan lawan, guna memblokir peningkatan kekuatan musuh.³⁶ Hal ini berbeda dengan ketergantungan langsung yang berkaitan perihal kebutuhan partner untuk didukung ketika diserang. Bilamana terjadi hubungan asimetris yang menyangkut kepentingan strategis, maka potensi meningkatnya rasa takut akan *abandonment* dapat terjadi. Negara dengan kepentingan strategis yang lebih besar akan lebih merasa takut pada potensi *abandonment*, kecuali bila partner memiliki ketergantungan langsung yang besar untuk mengimbangi hal tersebut. Perbedaan kepentingan strategis juga menyebabkan mengapa negara-negara besar dalam aliansi memiliki kekuatan yang kecil terhadap partnernya. Hal ini disebabkan karena bila kepentingan strategis dari negara besar sudah diketahui, maka partner

³⁵ Snyder, *Alliance Politics*, 45.

³⁶ Snyder, "The Security Dilemma in Alliance Politics," 472.

akan mengetahui bahwa mustahil terjadi pembelotan atau pilihan untuk beraliansi kembali.

Teori Dilema Aliansi Snyder menelusuri politik intra-aliansi antar negara, dengan melihat kecenderungan strategi yang dipilih atau komitmennya dalam aliansi, lalu seberapa besar dukungan yang akan diberikan. Dengan mengukur seberapa besar determinan di masing-masing jenis ketergantungan, dapat diketahui kecenderungan strategi yang dipilih oleh negara dalam aliansi dan risiko yang lebih ditakuti. Semakin besar akumulasi ketergantungan sebuah negara terhadap partner, maka negara akan memilih strategi “C” untuk menghindari risiko *abandonment*. Sementara bila tingkat ketergantungan pada partnernya lebih kecil, maka negara tersebut akan lebih condong memilih strategi “D” untuk menghindari risiko *entrapment*. Sayangnya, kedua strategi memiliki prospektif negatif atau kerugian masing-masing. Strategi “C”, meskipun dapat meningkatkan reputasi sebagai partner yang loyal, negara akan memiliki kekuatan tawar yang lebih rendah (seperti yang telah disinggung) dan lebih dekat dengan risiko *entrapment*. Sementara itu, pemilihan strategi “D” dapat meningkatkan risiko *abandonment*.³⁷

Selain itu, sub bagian analisa dalam penulisan ini nantinya akan menggunakan Konsep Keamanan dan Otonomi dari James D. Morrow. Menurut Morrow, pola aliansi asimetris memuat perbedaan keuntungan yang didapat dalam hubungan aliansi, yakni satu negara mendapatkan keamanan dan negara yang lain mendapatkan keuntungan otonomi.³⁸ Asumsi dasar Morrow adalah negara

³⁷ *Ibid.*, 469.

³⁸ James D. Morrow, “Alliances and Asymmetry: An Alternative to the Capability Aggregation Model of Alliances,” *American Journal of Political Science* 35, no. 4 (1991): 914.

berkekuatan kecil akan menukar otonominya untuk mendapatkan keamanan yang dapat disediakan oleh negara berkekuatan besar.³⁹ Konsep “keamanan” dalam model ini adalah kemampuan untuk mempertahankan resolusi isu yang sedang berlangsung (*status quo*). Sementara konsep “otonomi” adalah tingkat usaha sebuah negara untuk mencapai perubahan *status quo* yang diinginkan.⁴⁰ Tak jarang maksud keuntungan otonomi yang dapat dimiliki oleh negara yang lebih besar adalah wewenang untuk menempatkan pasukan di wilayah partner dan dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri si partner.⁴¹

Khusus untuk penulisan di bagian analisa, akan digunakan asumsi bahwa negara berkekuatan kecil dapat pula mengalami kerugian untuk segi keamanan nasionalnya dalam hubungan aliansi. Menurut Morrow, kerugian itu dapat berupa ancaman *entrapment* yang bermasalah karena negara berkekuatan lemah akan terjatuh dalam kebijakan jangka panjang si negara besar yang bersengketa dengan negara lain. Dalam artikel Morrow yang mengutip pandangan Snyder, dikatakan bahwa ancaman *entrapment* (terjatuh dalam perang untuk mendukung partner) adalah sumber utama hilangnya keamanan dalam hubungan aliansi.⁴² Risiko *entrapment* mengancam keamanan nasional karena kekalahan dalam perang dapat mengakibatkan negara harus mengikuti kesepakatan yang lebih parah daripada partner yang kehilangan kepentingannya. Itulah sebabnya mengapa Morrow menjelaskan bahwa keamanan yang diberikan oleh negara yang berkekuatan lebih

³⁹ Birthe Hansen, *Unipolarity and World Politics: A Theory and Its Implications* (New York: Routledge, 2012), 26.

⁴⁰ Morrow, “Alliances and Asymmetry,” 908.

⁴¹ Reiter dan Gärtner, *Small States and Alliances*, 18.

⁴² Morrow, “Alliances and Asymmetry,” 911.

besar memang meningkat seiring dengan kekuatannya, tetapi dapat berdampak negatif untuk si partner yang berkekuatan lebih lemah.⁴³

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Berbeda dengan kuantitatif, strategi penelitian yang kualitatif lebih menjelajahi proses dibandingkan dengan produk penelitian yang dihasilkan.⁴⁴ Kemudian, strategi ini berpusat pada pengartian sehingga mencakup bagaimana manusia mengartikan kehidupan, pengalaman, dan struktur dari dunia.⁴⁵ Kebanyakan analisis kualitatif menggunakan pendekatan *idiografis* (menjelaskan fitur unik dari sebuah kasus) dan alih-alih bersifat *nomotetik* (menggeneralisasi hubungan antar variabel tanpa melihat faktor spasio-temporal).⁴⁶

Kemudian, desain penelitian dalam skripsi ini menggunakan model longitudinal, berbeda dengan studi kasus yang menelaah secara detail dan intensif untuk sebuah kasus tunggal. Desain longitudinal berfokus pada satu negara sepanjang waktu tertentu yang melingkupi kebudayaan politik, struktur politik, sejarah, lawan / saingan negara, pelajaran historis, dan lain sebagainya.⁴⁷ Akan

⁴³ Morrow, "Alliances and Asymmetry," 912.

⁴⁴ Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research* (London: SAGE Publications, 1998), 25.

⁴⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (London: SAGE Publications, 1994), 145.

⁴⁶ Jack S. Levy, "Metode Kualitatif dalam Hubungan Internasional," dalam *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*, eds. Asrudin et al. (Malang: Intrans Publishing, 2014), 105.

⁴⁷ Jack S. Levy, "Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference," *Conflict Management and Peace Science*, no. 25 (2008): 10.

tetapi, model longitudinal untuk menginvestigasi kasus tertentu dapat dilakukan pada dua atau lebih titik waktu tertentu (*junctions*). Jadi, tanpa meneliti sepanjang masa untuk kasus tertentu, peneliti diperbolehkan mengeksplorasi data dari suatu kasus setelah beberapa rentang waktu terlewati.⁴⁸ Alhasil, penelitian menggunakan model longitudinal dapat mengambil inferensi klausal dengan melihat variabel data yang tersajikan dalam urutan waktu. Berikut adalah aplikasi model longitudinal untuk desain penelitian karya tulis ini (yang telah disinggung sebelumnya menggunakan tiga periodisasi waktu) dan dapat dilihat pada Tabel 1.1, yaitu:

Tabel 1.1 Desain Skripsi perihal Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang (Tiga Periodisasi Waktu) dengan Model Longitudinal⁴⁹

T₁ = 1954	T₂ = 1991	T₃ = 2001-2016
Obs₁ = Pembentukan SDF	Obs₁ = Pengiriman SDF saat Perang Teluk I	Obs₁ = Pengiriman SDF saat Perang Afghanistan dan Irak
Obs₂ = Reinterpretasi Pasal Sembilan untuk hak pertahanan diri	Obs₂ = Formulasi Hukum PKO untuk perizinan misi PKO PBB	Obs₂ = Kebijakan Abe perihal <i>Proactive Contribution to Peace</i>
Obs₃ = (Tidak ada untuk T ₁)	Obs₃ = Reinterpretasi Pasal Sembilan untuk <i>collective security</i>	Obs₃ = Reinterpretasi Pasal Sembilan untuk <i>collective</i>

⁴⁸ Alan Bryman, *Social Research Methods 4th Edition* (New York: Oxford University Press Inc., 2012), 63-65.

⁴⁹ Keterangan: T_n = Waktu dari variabel data yang akan diteliti; dan Obs_n = Variabel data yang diobservasi dalam penelitian. Untuk lebih selengkapnya, lihat Bryman, *Social Research Methods*, 65.

		<i>self-defense dan use of force</i>
--	--	--------------------------------------

Sumber: *Social Research Methods*

Terdapat tiga periode yang dipilih (tahun 1954, 1991, dan 2001-2016), dengan masing-masing periode mengambil tiga variabel data pula (Obs_n), kecuali untuk T_1 yang hanya ada dua variabel data. Pemilahan variabel-variabel data didasari atas periode dilakukannya reinterpretasi Pasal Sembilan oleh Pemerintah Jepang untuk menjustifikasikan pengeluaran kebijakan tertentu di periode tersebut, yakni: saat pembentukan SDF; pengiriman SDF ke Perang Teluk I dan formulasi Hukum PKO untuk misi PKO; serta pengiriman SDF di Afghanistan dan Irak, sekaligus kebijakan Abe yang baru. Variabel-variabel data ini telah disinggung terkait tiga periodisasi waktu yang telah dijabarkan di identifikasi dan pembatasan masalah. Dengan menakar konstelasi variabel data tersebut dari rentang urutan waktu (T_1 hingga T_3) pada Tabel 1.1, akan ditemukan inferensi klausal yang merujuk pada permasalahan rekonseptualisasi pasifisme di Jepang, lalu dicari letak pengaruh dilema aliansi Amerika Serikat dan Jepang yang menyebabkan hal tersebut.

Adapun dengan model longitudinal, jelas bahwa penulis akan menggunakan kerangka besar analisa induktif yang logikanya sejalan, yaitu dengan beranjak dari gejala-gejala khusus dan secara bertahap ke arah pembentukan hubungan klausal yang bersifat abstraksi.⁵⁰ Sementara itu, analisa data akan menggunakan pendekatan naratif (*narrative analysis*), yang sangat sensitif dengan

⁵⁰ Umar Suryadi Bakry, "Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Tradisional dan Sainifik," dalam *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*, eds. Asrudin et al. (Malang: Intrans Publishing, 2014), 20.

segi proses / urutan dan faktor temporal dari suatu kejadian yang mempengaruhi si objek penelitian.⁵¹ Pendekatan naratif sangat berbeda dengan pendekatan tematik, yang memecah data ke dalam fragmen-fragmen tema untuk diteliti. Alhasil, analisa data secara naratif meliputi bagaimana peneliti memahami kasus yang ada dan bukanlah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan desain longitudinal dari pengumpulan data yang menginferensikan rekonseptualisasi pasifisme di Jepang, penulis menggunakan pendekatan naratif untuk memahami penjelasan yang menyebabkan kasus tersebut.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Sementara mengenai teknik pengumpulan data, terdapat empat parameter yang harus diperhatikan dalam bagian ini, yaitu: keadaan (tempat di mana penelitian berlangsung), aktor (siapa yang akan diamati atau diwawancarai), kejadian (mengenai hal apa yang melibatkan aktor ketika sedang diamati atau diwawancarai), serta proses (berkembangnya sifat peristiwa yang dilakukan oleh aktor dalam keadaan tersebut).⁵² Pada perkembangannya, konstelasi variabel data yang akan dikumpulkan oleh penulis meliputi basis data yang bersifat primer dan sekunder, lalu bersifat longitudinal (perbandingan data pada satu lokasi spesifik dari satu tahun ke tahun tertentu). Akumulasi data primer diambil dari konstelasi pernyataan dan laporan resmi negara, seperti anggaran belanja militer, data alutsista, laporan analisa, serta buku putih pertahanan dari situs resmi pemerintahan

⁵¹ Bryman, *Social Research Methods*, 582.

⁵² Creswell, *Research Design*, 178.

tersebut. Di sisi lain, data sekunder untuk penelitian diambil melalui laporan lembaga akademis, jurnal, tesis / disertasi, dan situs berita.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini akan terdiri atas lima bagian, yaitu sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan hal-hal fundamental dari penelitian ini, yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : *One-Country Pacifism* dan Reinterpretasi Pasal Sembilan: Dari Doktrin Yoshida menuju Normalisasi Militer. Bab ini akan dibagi ke dalam lima pembahasan besar. Bagian pertama adalah terkait diskursus formulasi awal Pasal Sembilan. Sub bagian berikutnya akan membahas signifikansi Pasal Sembilan terhadap kebijakan Jepang dalam Doktrin Yoshida dan mendiskusikan karakter *one-country pacifism*. Selanjutnya, bagian ketiga adalah mengenai hubungan AS terhadap kebijakan reinterpretasi Pemerintah Jepang perihal pembentukan SDF; serta partisipasi pasukan SDF di Perang Teluk I dan formulasi Hukum PKO Jepang untuk misi PKO PBB. Pada bagian keempat, sub bab ini akan memperlihatkan tentang proses normalisasi militer Jepang, yakni kebijakan perihal: partisipasi Jepang di Perang Afghanistan dan Irak; tren belanja militer Jepang; serta Kebijakan Abe perihal *Proactive Contribution to Peace*. Terakhir, keseluruhan isi pembahasan bab dua akan dirangkum ke dalam bingkai kasus yang disebut oleh penulis sebagai rekonseptualisasi pasifisme di Jepang.

BAB III : Analisa Pengaruh Dilema Aliansi AS-Jepang terhadap Rekonseptualisasi Pasifisme di Jepang. Bab ini akan menelaah mengenai bagaimana pengaruh dilema aliansi AS-Jepang terhadap rekonseptualisasi pasifisme di Jepang. Analisa akan dieksplorasi dengan menggunakan Teori Dilema Aliansi oleh Glenn Snyder, dengan mengukur tingkat ketergantungan Jepang terhadap AS; kecondongan strategi yang dipilih dalam aliansi; serta prospektif dalam strategi aliansi yang dipilih oleh Jepang dan berkaitan dengan masalah rekonseptualisasi pasifisme. Kemudian, kedua unit analisa dan eksplanans akan dijelaskan melalui Konsep Otonomi dan Keamanan dari James D. Morrow

BAB IV : Simpulan. Bagian terakhir ini berisikan simpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah disusun berdasarkan metodologi yang telah ditentukan. Selain itu, dimuat juga saran yang diberikan oleh penulis terkait permasalahan dalam hasil penelitian.